

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah, atau aturan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan.

Tuntutan terhadap ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, agar informasi yang terkandung didalam laporan keuangan relevan. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah suatu pendekatan terhadap suatu organisasi yang memberikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Teori ini dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, dan juga perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sama halnya berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada BAPEPAM, agar informasi yang terkandung di laporan keuangan dapat bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:5) laporan keuangan adalah

“The principle means through which a company communicates its financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Selanjutnya, menurut Sukrisno Agoes (2014:76) laporan keuangan adalah

“Suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selesai suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum.

Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu laporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan surat pemberitahuan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data mengenai sumber daya yang dikelola, kewajiban perusahaan yang kemudian dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi perusahaan tersebut, yang kemudian dapat membantu proses pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Kerangka Konseptual Laporan Keuangan

Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusunan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada.

Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam menggunakan pertimbangan profesional, manajemen mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam kerangka konseptual.

Menurut Dwi Martini (2012:29) kerangka konseptual ditujukan untuk:

1. “Penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan.

3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
4. Para pengguna dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”.

Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan.

Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan dalam kerangka konseptual, maka ketentuan dalam standar akuntansi keuangan diunggulkan.

Penyusunan standar menggunakan kerangka konseptual ini sebagai acuan sehingga diharapkan konflik antara standar dan kerangka konseptual akan berkurang dengan berlalunya waktu. Sebagai contoh kerangka konseptual menggunakan konsep harga perolehan dalam mencatat nilai aset, namun dalam PSAK 19 tentang Aset Takberwujud menyatakan bahwa pengakuan nilai aset takberwujud dari kegiatan pengembangan internal dilakukan setelah memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan konsep tersebut biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya tidak dikapitalisasi sehingga nilai aset takberwujud tidak mencerminkan substansi ekonomi nilai perolehan dari aset takberwujud tersebut.

Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas:

1. “Pengguna laporan keuangan;
2. Tujuan laporan keuangan;
3. Asumsi dasar;
4. Karakteristik kualitatif;
5. Konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan;
6. Konsep pemeliharaan modal”.

2.1.2.3 Informasi Yang Dihasilkan Dari Laporan Keuangan

Informasi yang dihasilkan dalam akuntansi disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principle-GAAP*). Salah satu bentuk prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat ini digunakan di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut:

1. **“Laporan Posisi Keuangan**

Daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang sistematis, karena disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam Laporan Posisi Keuangan dapat diketahui berapa jumlah kekayaan entitas, kemampuan entitas membayar kewajiban serta kemampuan entitas memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang entitas kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam entitas tersebut.

2. **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.

3. **Laporan Arus Kas**

Pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset netto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dimasa mendatang.

4. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu.

5. **Catatan atas Laporan Keuangan**

Laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

Selain laporan-laporan keuangan tersebut, terdapat laporan yang dihasilkan oleh entitas, seperti: laporan tahunan, *sustainability report*, prospektus, dan laporan lain untuk memenuhi otoritas regulator. Kebutuhan informasi tentang entitas tidak hanya laporan keuangan, informasi nonkeuangan mulai mendapat perhatian dan diperlukan untuk pengambilan keputusan. Laporan tahunan yang diwajibkan oleh Bapepam-LK bagi entitas yang terdaftar di pasar modal mengombinasikan informasi keuangan dan nonkeuangan.

2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kualitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai.

Menurut Dwi Martani (2012:36) memiliki empat pokok karakteristik kualitatif yaitu:

1. “Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pembaca agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari laporan keuangan.

2. Relevan

Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di

masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain. Hal itu memerlukan konsistensi kebijakan akuntansi. Standar akuntansi juga diperlukan agar pengukuran dan penyajian informasi sama antar entitas yang berbeda.

Implikasi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut, karena pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Informasi keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya”.

2.1.2.5 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum laporan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:10) tujuan laporan keuangan adalah

“To provide financial information about the reporting entity that is usefull to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making dicisions in their capacity as capital providers. Information that is decisions usefull to investors may also bu usefull to other users of financial reporting who are not investors”.

Menurut Dwi Martani (2012:9) secara umum tujuan laporan keuangan adalah:

1. “Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya;
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai;
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu”.

2.1.2.6 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Dwi Martani (2012:33) pengguna laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. “Investor: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan: menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman: menilai kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan Kreditor: menilai kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan: menilai kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya
6. Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat: menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas”.

2.1.3 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan perusahaan, dan lain-lain (Sulistyo 2010:19). Pelaporan keuangan sesuai dengan SFAC No.1 dalam (Prahesti, 2011:11) terdiri atas, sebagai berikut:

1. “Laporan keuangan dasar (*basic financial statement*) yang terdiri atas laporan keuangan (*financial statement*) dan catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*)
2. Informasi-informasi tambahan (*supplementary information*),
3. Laporan-laporan lain selain laporan keuangan (*other means of financial reporting*)”.

2.1.4 Laporan Akuntan Publik

2.1.4.1 Pengertian Laporan Akuntan Publik

Menurut Sukrisno Agoes (2014:74) pada akhir pemeriksaan, dalam suatu pemeriksaan umum (*general audit*), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas:

- a. **“Lembaran Opini**
Merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
- b. **Laporan Keuangan**
Terdiri atas:
 - Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
 - Laporan Laba-Rugi Komprehensif (Laporan Laba Rugi).
 - Laporan Perubahan Ekuitas.
 - Laporan Arus Kas.

- Catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi: bagian umum (menejelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif (laba rugi).
- Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum dan administrasi serta beban penjualan”.

Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan (*audit field work*), terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Laporan Akuntan Publik

Menurut Sukrisno Agoes (2014:78) ada 3 jenis laporan auditor sebagai berikut:

1. Laporan Auditor Bentuk Baku

Laporan auditor bentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Unsur pokok laporan audit dalam bentuk baku adalah sebagai berikut:

- a. “Suatu judul yang memuat kata independen.

- b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor.
- c. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya.
- d. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar *auditing*/PABK yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAS.
- e. Suatu pernyataan bahwa *auditing* tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi:
 - 1) Pemeriksaan (*examination*), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
 - 2) Penentuan standar akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen.
 - 3) Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.
- h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
- i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik.
- j. Tanggal laporan auditor”.

2. Laporan Auditor Independen

- a. “Laporan audit yang berisi pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian karena penggunaan standar akuntansi yang menyimpang dari SAK/ETAP/IFRS.
- c. Laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian karena adanya pengungkapan yang tidak cukup.
- d. Laporan audit yang berisi pendapat tidak wajar.
- e. Laporan audit yang berisi pernyataan tidak memberikan pendapat sebagai akibat ketidakberhasilan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup karena pembatasan lingkup audit.

- f. Laporan audit yang berisi *review* terhadap informasi keuangan interim”.

3. Laporan Auditor Independen Tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas

Komite Standar Profesional Akuntan Publik, di bulan Maret 1998 telah mengeluarkan Interpretasi Pernyataan Standar *Auditing* (IPSA) No. 30.01 yang berjudul “Laporan Auditor Independen Tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas” yang berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah tanggal 2 Maret 1998.

Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya, yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai akibat terjadinya depresiasi mata uang negara-negara tersebut, berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya untuk tahun buku 1997. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya, sehingga pengguna laporan auditor dapat mengetahui dampak tersebut terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam hal ini auditor perlu mempertimbangkan tiga hal:

1. “Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya”.

Informasi yang perlu diungkapkan manajemen terdiri atas empat komponen berikut ini:

1. “Gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya.
2. Uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon atas memburuknya kondisi ekonomi tersebut.
3. Uraian rencana tindakan manajemen yang belum diimplementasikan.
4. Pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tersebut tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, yang berada di luar kendali perusahaan”.

2.1.5 Auditing

2.1.5.1 Pengertian Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4)

“Auditing is the accumulation and evaluation about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4) *auditing* adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Audit atas laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan berbentuk

Perseroan Terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya

setahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta pertanggung jawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.5.2 Jenis-jenis *Auditing*

1. Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

2. Menurut Sukrisno Agoes (2014:11) jenis-jenis audit ditinjau dari jenis pemeriksaan, sebagai berikut:

a. “*Management Audit (Operational Audit)*”

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran fungsi produksi, fungsi pergudangan

dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu *management audit* tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu *general (financial)* audit, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup:

a. *Analytical Review Procedures*

Membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, *budget* dengan realisasinya serta analisis rasio.

b. *Evaluasi atas management control system*

Tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern (*internal control*) yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayainya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

c. *Pengujian Ketaatan (Compliance Theory)*

Untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara *sampling* atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya.

Management Audit bisa dilakukan oleh:

- Internal Auditor
- Kantor Akuntan Publik
- *Management Consultant*.

Menurut Alvin Arens, dkk. (2011:825) yang diterjemahkan oleh Sukrisno Agoes (2014:12) ada tiga jenis operasional audit, yaitu:

1. ***“Fuctional Audits:*** untuk menilai 3E dari berbagai fungsi dalam perusahaan seperti fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi *marketing*, dan lain-lain.
2. ***Organization Audits:*** untuk menilai 3E dari keseluruhan organisasi perusahaan perencanaan organisasi dan metode untuk koordinasi aktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam jenis audit ini.

3. ***Special assignment***: timbul atas permintaan manajemen misalnya mengaudit penyebab tidak efektifnya *IT system*, investigasi kemungkinan terjadinya *fraud* di suatu bagian dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk”.
- b. **Pemeriksaan Kepatuhan (*Compliance Audit*)**
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.
- c. **Pemeriksaan Intern**
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, baik terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.
- d. ***Computer Audit***
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Ada dua metode yang bisa dilakukan auditor:

1. ***Audit Around The Computer***
Dalam hal ini auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari *EDP system* tanpa melakukan tes terhadap proses dalam *EDP system* tersebut
2. ***Audit Through The Computer***
Selain memeriksa *input* dan *output*, Auditor juga memeriksa *EDP*-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*”.

2.1.5.3 Prosedur *Auditing*

Menurut Sukrisno Agoes (2014:9) prosedur audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dijelaskan sebagai berikut:

1. “Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan:
 - Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 - Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 - Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 - Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara minimal atau dengan bantuan komputer.
 - Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan *audit field work* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah *audit field work* selesai KAP memberikan draft *audit report* kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah *draft report* disetujui klien, KAP akan menyerahkan *final audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal *audit report* dan tanggal selesainya *audit field work*.
5. Selain *audit report*, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya”.

Tabel 2.1

**PROSES EVALUASI PENGENDALIAN INTERN SAMPAI DENGAN
PENYELESAIAN AUDIT**

Dapatkan Gambaran Mengenai ICQ Yang Ada Di Perusahaan	Lakukan <i>Compliance Test</i> (<i>Test Of Recorded Transactions</i>)	Buat Kesimpulan Akhir (<i>Final Evaluation</i>) Terhadap <i>Internal Control</i> Klien	Lakukan <i>Substantive Test</i> (Pemeriksaan Atas Kewajaran Saldo) Pos-pos Laporan Keuangan
<p>1. Pelajari <i>Accounting and Operation Manual</i></p> <p>2. Pelajari Bagan Organisasi <i>and Job Description</i></p> <p>3. Lakukan Tanya Jawab dengan petugas klien.</p> <p>Dokumentasi Dalam Bentuk:</p> <p>A. <i>Internal Control Questionnaires</i></p> <p>B. <i>Flow Chart</i></p> <p>C. <i>Narrative</i> (Memo)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Lakukan <i>Walk Through</i>: Ambil 2 atau 3 dokumen, periksa apakah pemrosesannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam A, B, dan C. Jika diperlukan sesuaikan A, B, dan C.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Buat Kesimpulan Sementara (<i>Preliminary Evaluation</i>) terhadap <i>Internal Control</i> klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baik (Excellent, Good) • Sedang (Fair) • Lemah (Weak, Bad) <p>Jika kesimpulan sementara menyatakan <i>Internal Control</i> lemah, langsung lakukan <i>Substantive Test</i> yang diperluas. Jika I/C baik atau sedang, buktikan dengan melakukan <i>Compliance Test</i>.</p>	<p>Untuk membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah <i>Internal Control</i> yang ada betul seperti yang digambarkan dalam A, B, dan C. 2. Sistem dan Prosedur yang digambarkan dalam A, B, dan C betul-betul diterapkan di perusahaan. <p>Test Dilakukan Terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi Penjualan, Piutang, dan Penerimaan Kas. 2. Transaksi Pembelian, Utang, dan Pengeluaran Kas. 3. Pembayaran Gaji. 4. <i>Jurnal Voucher</i>. <p>Sebelumnya perlu ditentukan Cara Pemilihan Sampel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Judgement/ Random Sampling</i> b. <i>Block Sampling</i> c. <i>Substatistical Sampling</i>. 	<p>Jika <i>Internal Control</i> Baik, <i>Scope</i> Pemeriksaan (<i>Substantive Test</i>) bisa dipersempit.</p> <p>Jika <i>Internal Control</i> Lemah, <i>Scope</i> Pemeriksaan (<i>Substantive Test</i>) harus diperluas.</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jika kesimpulan mengenai Kewajaran Pos-pos Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Laba Rugi Komperhensif.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Buat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Audit <i>Adjustment</i> 2. (Draft) <i>Audit Report</i> 3. <i>Management Letter</i> <p>Minta: <i>Client Representation Letter</i> <i>Issue final audit report</i> Kirim tagihan pelunasan audit <i>fee</i></p>

2.1.5.4 Standar *Auditing*

Standar *auditing* berbeda dengan prosedur *auditing*. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar *auditing*, yang berbeda dengan prosedur *auditing*, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya (Sukrisno Agoes 2014:30).

Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011: 105.1-105.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Standar Umum

1. “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistensian penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Untuk perusahaan kecil dan menengah bisa memilih menggunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk perusahaan besar atau *go public* harus menggunakan PSAK dan mulai tahun 2012 menggunakan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

Aturan etika harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik sebelum 1 Januari 2011, sebagai berikut:

200. Standar Umum dan Standar Akuntansi

201. Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAPI:

A. Kompetensi profesional.

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

B. Kecermatan dan keseksamaan profesional.

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

C. Perencanaan dan supervisi.

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

D. Data relevan yang memadai.

Anggota KAP wajib memperoleh data yang relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

2.1.5.5 Tujuan Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) tujuan umum audit adalah:

“Untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia: Standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan, di USA; *Generally Accepted Accounting Principles*), diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau signifikan).

Akuntan publik tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara *sampling (test basis)* sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material (kecil atau *immaterial*) sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan”.

Dalam rangka memperoleh kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk

menyediakan dasar bagi opini audit yang akan diberikannya. Apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, atau tidak mungkin untuk menyatakan pendapat karena bukti audit yang tidak mencukupi, maka auditor bertanggung jawab untuk menyatakan hal tersebut kepada pengguna laporan keuangan dalam laporan auditnya.

2.1.6 Konsep Rasio Profitabilitas

2.1.6.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2013:699) menyatakan sebagai berikut:

“Profitability ratio is measure the income or operating success of a company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company’s ability to obtain debt and equity financing. It also affects the company’s liquidity position and the company’s ability to grow. As a consequence, both creditors and investors are interested in evaluating earning power-profitability. Analyst frequently use profitability as the ultimate test of management’s operating effectiveness”.

Menurut Agus Sartono (2010:122) menyatakan rasio profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Menurut Irham Fahmi (2011:135) rasio profitabilitas adalah

“Mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang diajukan oleh sebagian besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan secara keseluruhan efisiensi dan performa perusahaan. Rasio profitabilitas memiliki dua tipe yaitu rasio tingkat pengembalian investasi dan rasio kinerja. Rasio ini menggambarkan kondisi perusahaan kedalam ukuran profit. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan tentang efisiensi hasil pengembalian investasi untuk para pemegang saham.

2.1.6.2 Indikator Rasio Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2010:122) untuk mengukur kinerja, maka dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dengan menghitung rasio keuangan yang meliputi:

1. “Hasil Pengambilan atas Aset (*Return on Asset*)

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih.

Dengan kata lain, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

$$\text{GPM} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

4. Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih.

$$\text{OPM} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitungan rasio *return on asset* karena dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan.

Menurut Munawir (2010:91) manfaat ROA (*Return on Asset*) adalah

1. “Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.
2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah perencanaan strategi.

3. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA untuk kepentingan perencanaan”.

2.1.7. Konsep Rasio Solvabilitas

2.1.7.1 Pengertian Rasio Solvabilitas

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2013:747) rasio solvabilitas adalah:

“Debt ratio is debt to total asset measure the percentage of the total assets provide by creditors. To compute it, divide total debt (both: current a non current liabilities) by total asset. The higher the percentage of debt to total asset, the greator the risk that the company may unable to meet its maturing obligations”.

Menurut Agus Sartono (2010:120) rasio solvabilitas adalah:

“Menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi: 1) pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan; 2) dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya pun akan meningkat dan; 3) dengan menggunakan utang pemilik memperoleh dana dan kehilangan pengendalian perusahaan”.

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2013:151). Dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas bagi kreditor jangka panjang dan pemegang saham. Kelompok-kelompok ini tertarik pada kesehatan jangka panjang dan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan kata lain, rasio solvabilitas harus membuktikan bahwa perusahaan dapat memberikan layanan hutang mereka atau membayar bunga atas hutang mereka dan juga membayar pokok ketika hutang

jatuh tempo. Rasio solvabilitas juga membantu pemilik bisnis mempertahankan perusahaan dalam kemungkinan kebangkrutan. Karena rasio hutang meningkat, kemungkinan kebangkrutan juga meningkat seiring perusahaan yang dibiayai dengan hutang dibandingkan dengan sumber ekuitas.

2.1.7.2. Indikator Rasio Solvabilitas

Menurut Agus Sartono (2010:121) indikator untuk rasio solvabilitas, sebagai berikut:

1. Rasio Utang (*Debt Ratio*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Rasio ini juga sering dinamakan sebagai rasio utang terhadap aset (*debt to asset ratio*).

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. Rasio Utang Jangka Panjang (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Time Interest Earned Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan

perusahaan disini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{EBIT}{\text{Interest Expense}} \times 100\%$$

5. Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban

Merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional.

$$\text{Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Liabilities}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *debt to asset ratio (DAR)* karena semakin besar proporsi hutang terhadap total aset maka akan meningkatkan kerugian, dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. *Debt to asset ratio* ini mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat biasanya cenderung akan melakukan kesalahan manajemen, dan kecurangan (*fraud*).

2.1.8. Konsep Opini Auditor

2.1.8.1 Pengertian Opini Auditor

Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian yang disajikan perusahaan. (Kamus Standar

Akuntansi). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011

(PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

1. “Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified opinion with explanatory language*)
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
5. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)”.

2.1.8.2 Jenis-jenis Opini Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2014:75) opini audit ada lima jenis, yaitu:

1. **“Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar *auditing* yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Dengan pendapat tersebut, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan laporan keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
2. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)**
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor
Keadaan tersebut meliputi:
 - a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
 - b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Bapepam-LK namun tidak disajikan.
- g. Informasi yang diharuskan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup adanya pembatasan terhadap lingkungan audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar laporan keuangan dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan

ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar maka ia harus menjelaskan dalam paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal tersebut.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut”.

2.1.8.3 Indikator Opini Auditor

Pengukuran untuk opini auditor dengan menggunakan variabel *dummy*, untuk angka 1 menyatakan untuk perusahaan yang mendapatkan opini audit *unqualified opinion*, untuk nilai 0 menyatakan untuk perusahaan yang mendapat opini selain *unqualified opinion*.

2.1.9 Audit Delay

Audit Delay adalah waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai diterbitkannya laporan audit (Moch Sulthoni, 2013: 10).

Audit delay adalah jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit *delay* menunjukkan lama penyelesaian audit dimana tujuan dari audit laporan keuangan yaitu memberikan pendapat apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan PABU dalam semua hal yang material Novice dan Budi (2010).

Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Untuk menyelesaikan laporan audit, auditor tentu memerlukan waktu. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit akan mempengaruhi lamanya proses pengumuman laporan keuangan perusahaan. Fenomena kelambatan proses audit dalam *terminology* penelitian pengauditan dikenal dengan audit *delay*. Dalam beberapa penelitian, audit *delay* sering juga disebut dengan *audit report lag* yang didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Dyer dan McHugh dalam Camelia Putri (2011), keterlambatan atau *lag* dibagi menjadi:

- a. *Preliminary lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
- b. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor.

- c. *Total lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Dengan semakin pesatnya perusahaan yang terdaftar di pasar modal berdampak pada peningkatan permintaan atas audit laporan keuangan oleh auditor independen. Laporan keuangan sebagai media informasi untuk mengetahui kinerja perusahaan harus dilaporkan secara tepat waktu dan akurat. Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat memberikan informasi yang relevan bagi para penggunanya. Lamanya waktu penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan hingga tanggal diselesaikannya laporan oleh auditor independen disebut dengan audit *delay* (Febrianty dalam Rustini dan Sugiarti, 2012).

Peraturan untuk emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengikuti Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan untuk perusahaan yang menyimpan efek di Indonesia saja.

2.1.9.1 Indikator Audit *Delay*

Pengukuran untuk Audit *Delay* menggunakan skala rasio dengan rumus
Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wariyanti (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap Audit *Delay* penelitian tersebut mengambil populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa hanya variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*, sedangkan *leverage* (DER) dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap Audit *Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit *delay*. Penelitian tersebut mengambil populasi sebanyak 30 perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.

Tabel 2.2
Perbedaan dengan Penelitian Yang Direplikasi

No	Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Penulis
1.	Variabel Independen	Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor.	Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor
2.	Variabel Dependen	Audit <i>Delay</i>	Audit <i>Delay</i>
3.	Lokasi Penelitian	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
4.	Tahun penelitian	Tahun 2012-2015	Tahun 2011-2016

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* sudah banyak berkembang di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Andi Kartika (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dengan jumlah sampel 256 perusahaan. Andi Kartika (2011) menguji variabel ukuran perusahaan, operasi kerugian dan keuntungan, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor, dan reputasi auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Di sisi lain operasi kerugian dan keuntungan, profitabilitas, opini auditor, dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap audit *delay*.

Selanjutnya, Dwi Hayu dan Herry (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dari 92 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Dwi Hayu dan Herry (2013) menguji variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *auditor's gender*, dan reputasi KAP. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, *auditor's gender*, dan reputasi KAP

berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*, sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Selanjutnya, Pebi Putra, Marsono (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dari 72 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pebi Putra, Marsono (2013) menguji variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, corporate income, ukuran KAP, dan opini auditor. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, namun secara parsial hanya enam faktor yang berpengaruh diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, opini auditor berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan untuk *income corporate* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Selanjutnya Yanuarizqi, Dazzara Putri (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dari 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. Variabel independen yang diuji adalah profitabilitas, internal audit, ukuran perusahaan, dan sektor industri. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa profitabilitas, internal auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Sedangkan, variabel sektor industri berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Selanjutnya, Arizal dan Indah (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dari 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011. Variabel independen yang diuji adalah ukuran KAP, laba/rugi perusahaan, opini audit, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran KAP, laba/rugi operasi, dan ukuran

KAP tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan, secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay*. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, menurut Ni Putu Sonia, dan Made Mertha (2016) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan secara negatif profitabilitas berpengaruh pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan, solvabilitas berpengaruh positif pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu diatas dapat diringkas dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Andi Kartika (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit <i>Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Operasi Kerugian/Keuntungan, Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Auditor, dan Reputasi Auditor. 	Analisis Regresi Linier Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial Total Aset, dan Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap Audit <i>Delay</i>. • Kerugian/Keuntungan Operasi Profitabilitas, Opini Auditor, dan Reputasi Auditor tidak

		<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> 		Memiliki pengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .
Dwi Hayu Dan Herry Laksito (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Auditor's Gender</i>, dan Reputasi KAP. • Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas, <i>Auditor's Gender</i>, dan Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i>. • Sedangkan untuk Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i>.
Pebi Putra, Marsono (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, <i>Corporate Income</i>, Ukuran KAP, dan Opini Auditor. • Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial faktor yang berpengaruh diantaranya Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, Opini Auditor berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>. Sedangkan untuk <i>Income Corporate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. • Secara simultan variabel independen berpengaruh

				terhadap variabel dependen.
Yanuarizqi, Dazzara Putri (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: ukuran perusahaan, profittabilita, Solvabilitas, <i>Corporate Income</i>, Ukuran KAP, dan Opini Auditor. • Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran KAP, Laba/Rugi Operasi, dan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. Sedangkan, secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>. • Secara simultan Variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen.
Arizal dan Indah (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Ukuran KAP, Laba/Rugi Perusahaan, Opini Sudit, dan Ukuran Perusahaan. • Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran KAP, Laba/Rugi Operasi, dan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>. Sedangkan, secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh

				<p>terhadap <i>Audit Delay</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
<p>Ni Putu Sonia dan Made Mertha (2016)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan. • Variabel Dependen: Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan. 	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara negatif Profitabilitas berpengaruh pada Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan. Solvabilitas berpengaruh positif pada Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan. • Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peraturan untuk emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengikuti Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan untuk perusahaan yang menyimpan efek di Indonesia saja, sedangkan untuk emiten atau perusahaan publik tercatat di Bursa Efek Indonesia dan di negara lain mengikuti peraturan berikut ini.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-431/BL/2012 disebutkan:

1. Bahwa penyampaian laporan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
2. Laporan tahunan yang disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib membuat informasi yang sama paling kurang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam angka 2.

Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, agar informasi yang terkandung didalam laporan keuangan relevan.

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit *Delay*

Menurut Kasmir (2013:196)

“Profitabilitas memiliki tujuan untuk memperlihatkan perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Apabila perusahaan memperlihatkan perkembangan baik maka auditor tidak akan menunda penyampaian informasi baik tersebut. Tetapi, apabila perusahaan memperlihatkan perkembangan buruk maka auditor akan menunda penyampaian informasi tersebut, karena auditor cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit”.

Menurut Mamduh dan Abdul (2012:81)

“Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Rasio ini mengukur tingkat aset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen.

Informasi kinerja keuangan sangat diperlukan perusahaan terutama dalam pencapaian tingkat profitabilitas karena profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi membutuhkan waktu audit lebih cepat karena adanya pertanggungjawaban untuk menyampaikan kabar baik kepada publik”.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:81)

“Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah akan berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan.

Hasil penelitian Na'im dalam Andi Kartika (2011) menemukan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah akan memacu kemunduran publikasi laporan keuangan auditan. Perusahaan publik yang mengumumkan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami penerbitan laporan keuangan auditan dari auditor yang

lebih panjang daripada perusahaan non publik. Ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan pasar terhadap pengumuman tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin pendek *audit delay*nya.

Hasil penelitian Puspitasari dan Anggraeni (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mengumumkan laba yang merupakan berita baik perusahaan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan yang mengumumkan rugi. Jadi, semakin perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka *audit delay*nya akan semakin pendek.

2.3.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2013:703)

“The higher percentage of debt to total asset, the greater the risk that the company may be unable to meet its maturing obligations”.

Menurut Mamduh dan Abdul (2012:79)

“Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan *leverage* keuangan yang tinggi. Penggunaan *financial leverage* yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham akan menurun cepat pula. Resiko perusahaan dengan *financial leverage* yang tinggi akan semakin tinggi pula”.

Carslaw & Kaplan dalam Febrianty (2011:304) mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara *debt to asset ratio* dengan *audit delay* yaitu sebagai berikut:

- “Bahwa *debt to asset ratio* mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Proporsi *debt to asset ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan, sehingga auditor akan

meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Sebagai konsekuensinya, auditor akan meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit.

- Mengaudit hutang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staff dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal. Dengan demikian, auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit delay”.

Menurut Sutrisno (2009:217)

“Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko perusahaan tersebut akan bertambah, karena akan semakin tinggi pula tingkat pendanaan perusahaan yang harus disediakan oleh pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit *delay* akan lebih panjang”.

Penelitian Weston dan Copeland (2010) menyatakan bahwa rasio solvabilitas mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang utang totalnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Hasil yang digunakan dalam penelitian diantaranya variabel solvabilitas secara multivariate diperoleh indikasi bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Menurut Puspitasari dan Anggraeni (2012) menunjukkan bahwa variabel solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Tingginya rasio utang yang dimiliki perusahaan membuat auditor semakin lama dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini disebabkan karena auditor dalam melakukan uji pengendalian substantif lebih lama karena auditor cenderung meningkatkan kehati-hatian karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan.

Tingginya utang yang dimiliki perusahaan dapat membuat investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya.

2.3.3. Pengaruh Opini Auditor Terhadap Audit Delay

Desakan klien yang meminta opini WTP dan upaya auditor mewujudkan keinginan klien merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik audit (Tuannakota 2011: 171). Ketika auditor menemukan penyimpangan dalam proses audit karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit.

Menurut Givoly dan Palmon dalam Dias dan Dwi (2014) bahwa berita buruk dari laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penundaan pelaporan keuangan. Perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian akan menunda pelaporan keuangan mereka dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian.

Penelitian Ashton dalam Sulthoni (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang diberikan *qualified opinion* cenderung memiliki audit *delay* yang lebih panjang, karena secara logika dapat dikatakan bahwa auditor membutuhkan waktu dan usaha untuk mencari prosedur audit ketika mengkonfirmasi kualifikasi audit.

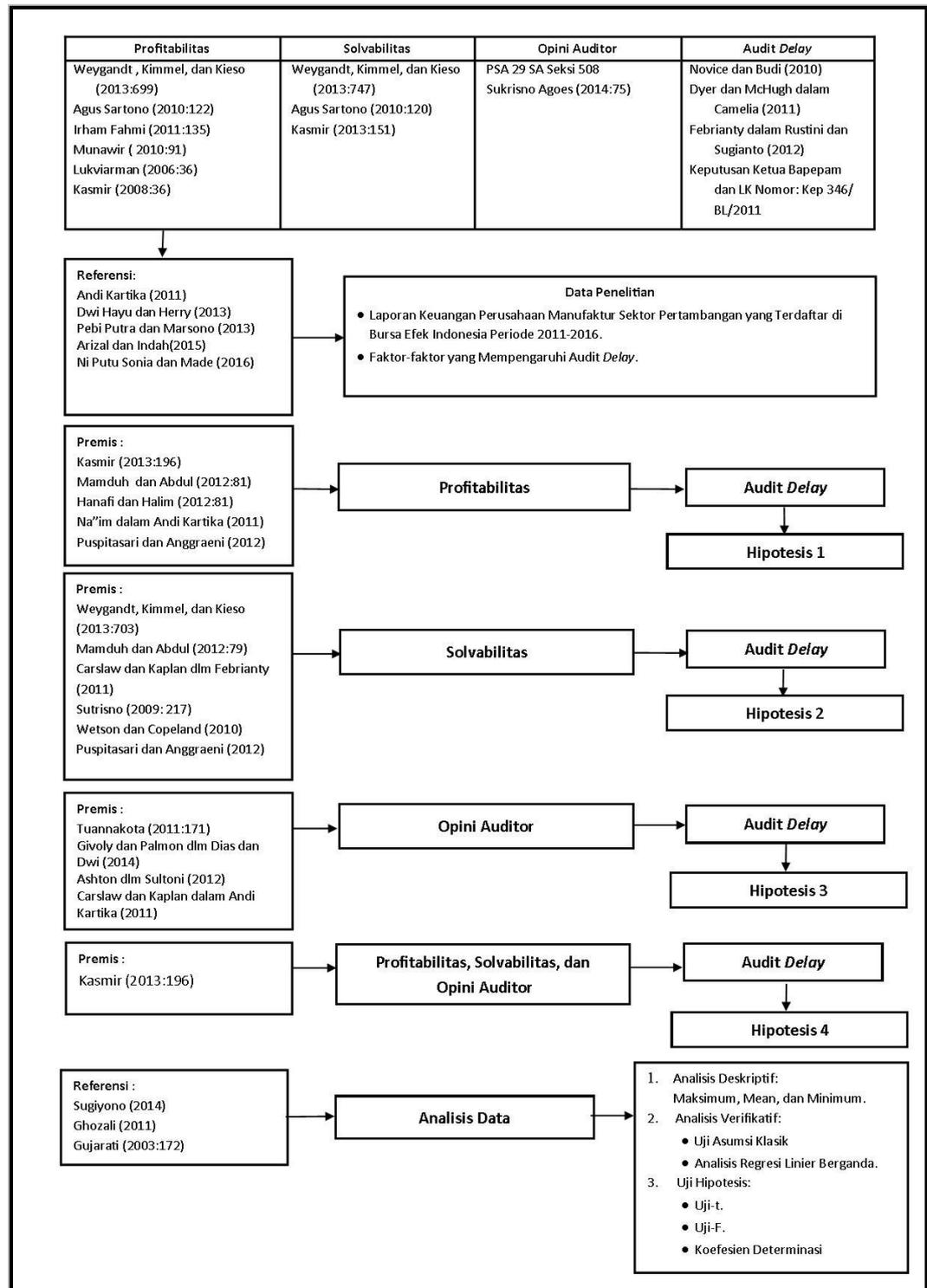
Menurut Carslaw dan Kaplan dalam Andi Kartika (2011), perusahaan yang tidak menerima opini *unqualified opinion* diperkirakan mengalami audit *delay* yang lebih panjang alasannya perusahaan yang menerima opini tersebut memandang sebagai *bad news* dan akan memperlambat proses audit.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay Secara Simultan

Menurut Kasmir (2013:196)

“Apabila perusahaan memperlihatkan perkembangan baik maka auditor tidak akan menunda penyampaian informasi baik tersebut. Tetapi, apabila perusahaan memperlihatkan perkembangan buruk maka auditor akan menunda penyampaian informasi tersebut, karena auditor cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) menyatakan bahwa hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh solvabilitas terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh opini auditor terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor terhadap audit *delay* secara simultan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.